



Legislatif Desak Validasi Berlapis Antisipasi Fenomena ‘Titip Nama’ Saat PPDB

YOGYA, TRIBUN - Pelaksanaan Penerimaan-Peserta Didik Baru (PPDB) serentak tahun 2026 menjadi perhatian serius jajaran legislatif Kota Yogyakarta. Deretan celah kecurangan terkait manipulasi data kependudukan hingga pemenuhan hak kelompok rentan diminta menjadi evaluasi total.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, mendesak pengetatan validasi data Kartu Keluarga (KK) pada PPDB serentak 2026 untuk menghentikan fenomena “titip nama” di zona sekolah favorit. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan berulang, maka dampaknya jelas merugikan calon siswa yang benar-benar berhak di dalam suatu zonasi.

“Fenomena akal-akalan titip nama di KK demi masuk seko-

lah yang dianggap favorit ini harus disudahi. Sistem validasi kependudukan yang disiapkan Disdikpora harus benar-benar berlapis dan transparan bersama instansi terkait,” tegasnya, Jumat (12/6).

“Jangan sampai warga asli yang berdomisili di sekitar sekolah justru harus tersingkir oleh mereka yang hanya menumpang alamat,” tambah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain masalah zonasi, ia juga menekankan agar sistem online yang tengah dimatangkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY mampu menjamin secara adil terpenuhinya kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Menurutnya, kesuksesan infrastruktur PPDB online ti-

dak hanya diukur dari server yang tidak down, tetapi juga pada aksesibilitas sistem tersebut bagi kelompok rentan agar asas keadilan dapat terpenuhi.

“Hak pendidikan itu setara dan inklusif. Kuota afirmasi untuk siswa dari keluarga rentan ekonomi dan penyandang disabilitas tidak boleh sekadar angka formalitas di sistem. Kelompok ini seringkali rentan pada kendala administratif, sehingga haknya harus betul-betul terkawal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kuncoro mengimbau seluruh orang tua dan wali murid agar mematuhi prosedur jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi yang berlaku dengan jujur, serta berkoordinasi dengan posko pengaduan PPDB jika menemui kendala di lapangan. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005